



LAKIP

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INTANSI PEMERINTAH

2020

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah SWT karena atas nikmat, rahmat, dan maghfirah-Nya laporan Ini dapat diselksaikan dengan tepat waktu. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad ShalalLahu Alaihi Wasalam, keluarganya, para sahabat, tabi'in dan para pengikutnya hingga akhir jaman, Aamiin.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Bandung Tahun 2020 dapat disusun, hal ini sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan atas target kinerja dan penggunaan anggaran Tahun 2020. Laporan kinerja ini juga merupakan perwujudan dari pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Bandung.

Laporan ini menggambarkan terkait keadaan yang dihadapi dan rencana tindak lanjut untuk perbaikan kinerja kedepan. Semoga laporan kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Bandung Tahun 2020 ini dapat dipahami dengan baik, dan mampu memenuhi harapan semua pihak, serta dapat dimanfaatkan sebagai media informasi kinerja dan alat evaluasi kinerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM khususnya di Lingkungan Pemasyarakatan.

Kepala,
Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Bandung

Riko Stiven
NIP. 19870516 200604 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABLE.....	iii
DAFTAR GAMBAR	iii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Dasar Hukum.....	2
C. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	3
BAB II.....	7
PERENCANAAN KINERJA	7
A. Perencanaan Strategis.....	7
B. Perjanjian Kinerja.....	10
BAB III	12
AKUNTABILITAS KINERJA	12
A. Capaian Kinerja	12
B. Realisasi Anggaran.....	14
C. Evaluasi dan Analisis Realisasi Kinerja	17
D. Akuntabilitas Keuangan.....	28
BAB IV.....	30
PENUTUP	30
A. KESIMPULAN.....	30
B. SARAN.....	31

DAFTAR TABLE

Tabel 1	:	Diagram Struktur Organisasi
Tabel 2	:	Pegawai Rutan Kelas 1 Bandung
Tabel 3	:	Data Penghuni Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Bandung

DAFTAR GAMBAR

1. Diagram Peta Strategis Ditektorat Jenderal Pemasyarakatan;
2. Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020;
3. Dokumen Laporan Realisasi Rutan Kelas 1 Bandung Tahun 2020
4. Diagram Hasil Survey Layanan Kunjungan Rutan Kelas 1 Bandung
5. Penerapan Media Informasi
6. Dokumen Kegiatan Perawatan
7. Dokumen Peningkatan Keamanan dan Pelatihan
8. Dokumen Penerapan E-Performace Rutan Kelas 1 Bandung

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Bandung merupakan unit pelaksana teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia khususnya dibidang Pemasyarakatan. Berdasarkan hal tersebut, maka Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Bandung wajib membuat pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dalam bentuk dokumen LAKIP. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau biasa kita sebut LAKIP merupakan upaya dalam membangun pemerintahan yang baik (*Good Governance*), pemerintahan yang bersih (*clean governance*), dan terpercaya adalah tujuan dari reformasi birokrasi yang telah berjalan lebih dari 2 (dua) dasawarsa, hal ini sebagaimana tertuang dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi Kolusi, dan Nepotisme. LAKIP merupakan instrument yang digunakan oleh instansi pemerintah, baik kementerian atau lembaga untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta memberikan gambaran tentang berbagai hal yang telah dilaksanakan dan hambatan yang dihadapi.

LAKIP terdiri dari komponen yang merupakan satu kesatuan diantaranya, perencanaan strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan reuiu serta evaluasi kinerja. LAKIP dibuat sebagai implementasi Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah untuk melakukan pelaporan pengukuran pencapaian kinerja pada Tahun 2020 di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Bandung. Pada pelaksanaannya, Perpres ini dilengkapi dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reuiu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. Dasar Hukum

Berikut adalah kajian dan tinjauan terhadap dasar hukum yang mengatur mengenai penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP):

1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
2. Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;
3. Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
9. Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
10. Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan HAM RI;
11. Keputusan Kepala LAN No: 239/IX/2003 tentang Pedoman Penyusunan LAKIP;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. M.HH-05.OT.01.10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

15. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. 28 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
16. Permenpan RB No. 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan
17. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HH-19.OT.03.01 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

C. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Bandung dibangun pada tahun 1927, sebelum digunakan untuk Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung terlebih dahulu dipinjam dan digunakan untuk Lembaga Pemasyarakatan (LP) Militer untuk Tahanan politik dan militer dari tahun 1960 sampai tahun 1980, kemudian dikosongkan. Rutan Kelas I Bandung selanjutnya dipergunakan untuk Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kelas II A Banceuy, baru pada tanggal 01 Juli 1990 resmi digunakan untuk Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung. Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung terletak di Jalan Jakarta No. 29 Kelurahan Kebonwaru, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Sebelah Utara dan sebelah Timur berbatasan dengan Sekolah Tinggi Teknologi (STT) Tekstil Bandung, sebelah Barat berbatasan dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat, dan sebelah Selatan dengan Jalan Jakarta Bandung.

➤ Tugas

Melaksanakan perawatan terhadap tersangka atau terdakwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

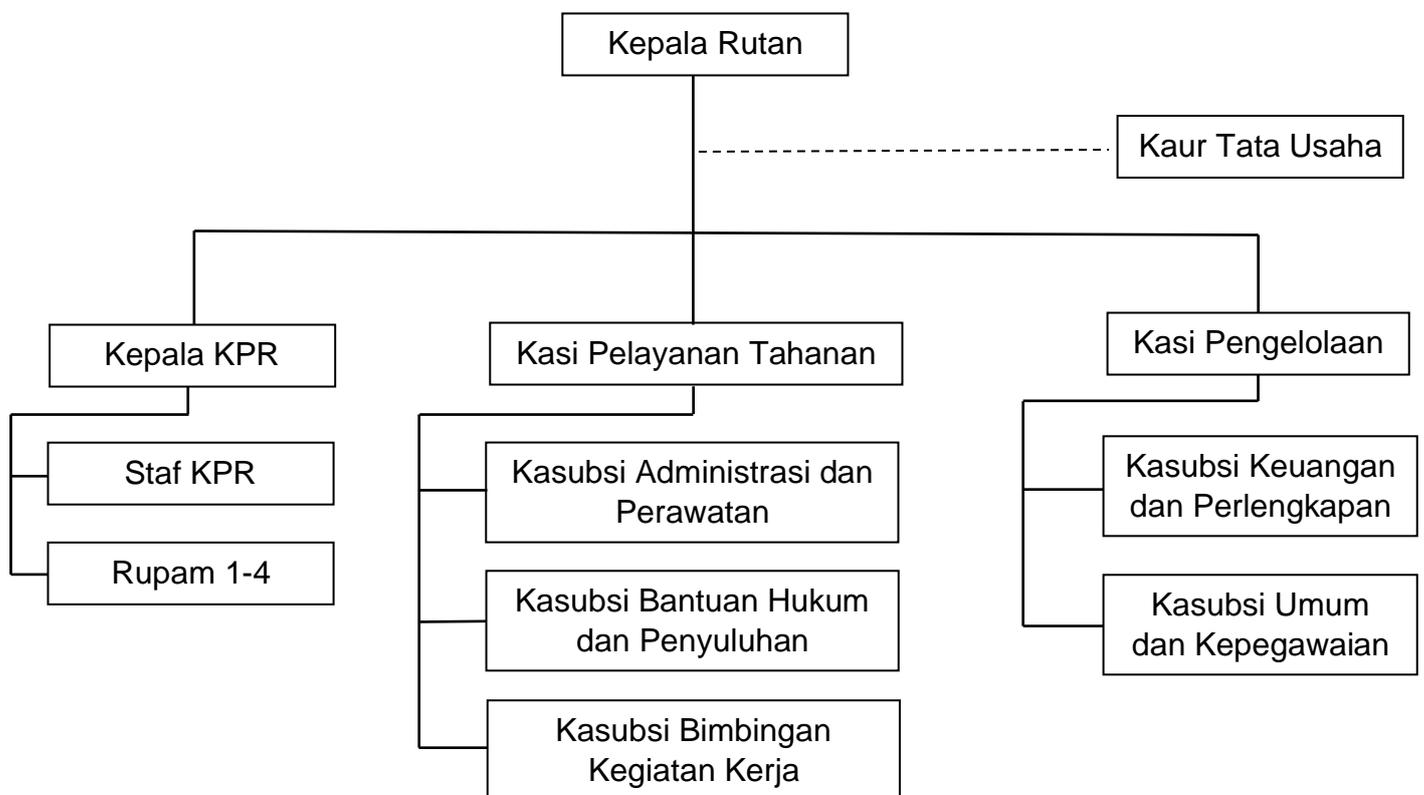
➤ Fungsi

Melaksanakan pelayanan tahanan, pemeliharaan keamanan dan tata tertib, pengelolaan dan tata usaha Rumah Tahanan Negara.

➤ Kedudukan

Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung adalah Unit Pelaksana Teknis dibidang pelayanan Tahanan dalam rangka untuk kepentingan penyidikan penuntutan, dan pemeriksaan sidang di pengadilan. Kedudukannya di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat, serta bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

➤ Struktur Organisasi



Tabel 1. Diagram Struktur Organisasi

➤ Profil Pejabat Struktural

1. Nama : RIKO STIVEN, A.Md.I.P., S.A.P., M.Si.
NIP : 19870516 200604 1 001
Pangkat/Gol : Penata (III/c)
Jabatan : Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Bandung
2. Nama : DIAZ ARTHUR ARMANDO, Amd.IP., S.H.
NIP : 19900707 200901 1 001
Pangkat/Gol : Penata Muda Tk. I (III/b)
Jabatan : Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan
3. Nama : IRFAN RIZKY PRASETYAWAN, A.Md.I.P., S.H.
NIP : 19880305 200901 1 001
Pangkat/Gol : Penata Muda (III/a)
Jabatan : Kepala Seksi Pelayanan Tahanan
4. Nama : MUHAMMAD DIHARJA, S.Sos.
NIP : 19860724 200703 1 001
Pangkat/Gol : Penata Muda Tk. I (III/b)
Jabatan : Kepala Seksi Pengelolaan
5. Nama : SARINAH, S.E.
NIP : 19640727 198503 2 001
Pangkat/Gol : Penata Tk. I (III/d)
Jabatan : Kepala Urusan Tata Usaha
6. Nama : MUH. ARFAN BAKHTIAR, A.Md.I.P., S.H.
NIP : 199111172010121001
Pangkat/Gol : Penata Muda Tk. I (III/b)
Jabatan : Kepala Sub Seksi Administrasi dan Perawatan
7. Nama : MARCHILES, A.Md.I.P., S.H. M.H.
NIP : 19900624 200912 1 001
Pangkat/Gol : Penata Muda Tk. I (III/b)
Jabatan : Kepala Sub Seksi Bantuan Hukum dan Penyuluhan
8. Nama : WAHYUDDIN RANI, A.Md.I.P., S.H.
NIP : 199005112009011 001
Pangkat/Gol : Penata Muda (III/a)
Jabatan : Kepala Sub Seksi Bimbingan Kegiatan Kerja
9. Nama : INDRA GANJAR NUGRAHA, S.H., M.H.
NIP : 19850219 200312 1 002
Pangkat/Gol : Penata (III/c)
Jabatan : Kepala Sub Seksi Keuangan dan Perlengkapan
10. Nama : Drs. DENI DASMANA, M.A.P.
NIP : 19670103 199603 1 002
Pangkat/Gol : Pembina (IV/a)
Jabatan : Kepala Sub Seksi Umum dan Kepegawaian

➤ Pegawai Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Bandung

No	Pendidikan	Golongan			
		IV	III	II	I
1	S2	5	4	-	-
2	S1	-	56	-	-
3	D3	-	6	-	-
4	SMA	-	25	90	-
5	SMP	-	-	-	-
6	SD	-	-	1	-

Tabel 2. Pegawai Rutan Kelas 1 Bandung

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Pengelolaan keuangan negara untuk pencapaian tujuan negara serta dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya Direktorat Jenderal Pemasarakatan sesuai ketentuan perundang-undangan, menyusun rencana strategis (renstra) digunakan sebagai rencana lima tahun kedepan dalam mencapai visi dan melaksanakan misi dengan tujuan dan sasaran strategis serta arah kebijakan dan indicator pengukurnya.

➤ Visi

Menjadi Penyelenggara Pemasarakatan yang profesional dalam penegakan hukum dan perlindungan HAM.

➤ Misi

Melaksanakan perawatan Tahanan, Pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan dalam rangka penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia melalui proses pemasarakatan dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip pengayoman.

➤ Nilai dasar organisasi

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tata nilai kami "PASTI":

1. Profesional

Aparatur Kementerian Hukum dan HAM adalah aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi.

2. Akuntabel

Setiap kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.

3. Sinergi

Komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat, dan berkualitas.

4. Transparan

Kementerian Hukum dan HAM menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan,

yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

5. Inovatif

Kementerian Hukum dan HAM mendukung kreatifitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

➤ Tujuan

1. Membentuk WBP agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat dan berperan aktif dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab; dan
2. Memberi jaminan perlindungan Hak Asasi Tahanan dalam rangka memperlancar proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

➤ Sasaran

1. Perawatan dan Pembinaan

- a. Kualitas Ketakwaan Kepada Tuhan YME;
- b. Kualitas Intelektual;
- c. Kualitas sikap dan perilaku;
- d. Kualitas profesionalisme dan keterampilan; dan
- e. Kualitas kesehatan jasmani dan rohani.

2. Pelaksanaan

- a. Isi lebih rendah dari kapasitas;
- b. Menurunkan angka pelarian dan gangguan kamtib;
- c. Meningkatkan secara bertahap jumlah Napi yang bebas sebelum waktunya melalui proses asimilasi dan integrasi;
- d. Semakin menurunnya angka residivis;
- e. Prosentase kematian dan sakit sama dengan prosentase yang ada di masyarakat;
- f. Biaya perawatan sama dengan kebutuhan minimal manusia pada umumnya;
- g. Rutan dalam keadaan bersih dan terpelihara;
- h. Semakin terwujudnya lingkungan pembinaan yang menggambarkan proyeksi nilai-nilai masyarakat dan semakin berkurangnya nilai-nilai sub kultur penjara.

➤ Peta strategi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

Sasaran strategi yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang tertuang dalam sebuah gambar dan diagram ini dijadikan landasan arah kebijakan yang Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya serta kegiatan-kegiatan yang menunjang terwujudnya visi dan misi Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung.

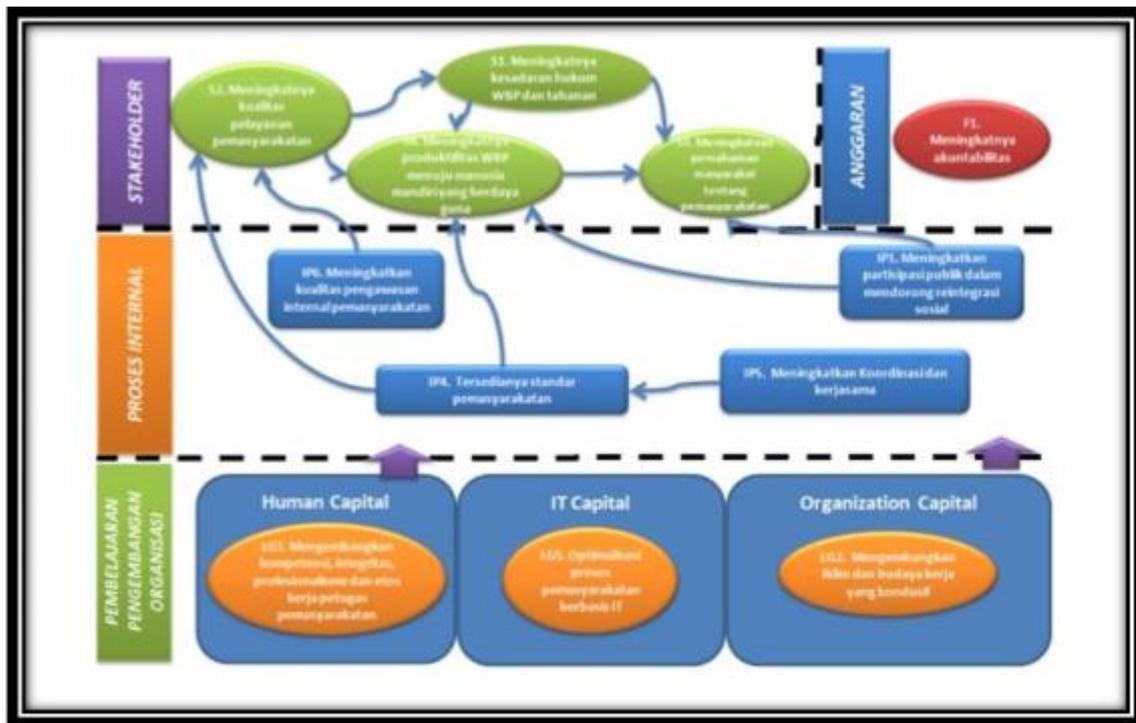


Diagram Peta Strategis Ditektorat Jenderal Pemasyarakatan

Dalam diagram diatas menunjukkan bahwa menegakan hukum dan hak asasi manusia terhadap Warga Binaan Pemasyarakatah menjadi nomor utama, yang kedua adalah pengelolaan Pemasyarakatan yang menerapkan standar Pemasyarakatan berbasis IT, Ketiga meningkatkan Pastisipasi masyarakat untuk terlibat, mendukung dan mengawasi dalam penyelenggaraan pemasyarakatan dan mengembangkan profesionalisme dan meningkatkan budaya kerja petugas yang bersih dan bermartabat,

➤ Arah Kebijakan Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Bandung

Arah kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi

instansi pemerintah. Kebijakan yang ditempuh Rutan Kelas 1 Bandung sesuai dengan arah kebijakan dari Dirjen PAS yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu:

- a. Melakukan Pencanangan kembali Pembangunan Zona Ingeritas Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) setelah Rutan Kelas I Bandung mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara.
- b. Pelayanan masyarakat sesuai dengan standar dan berbasis IT.
- c. Pemantapan dan penajaman strategi perencanaan jangka panjang secara komprehensif dengan memperhatikan lingkungan strategis;
- d. Pemantapan evaluasi kinerja, kelembagaan, sop layanan, dan standar layanan;
- e. Peningkatan tata laksana, administrasi umum dan kompetensi pegawai serta memberikan informasi yang akurat dan tepat.
- f. Penanganan Covid-19 dengan penerapan skenario "New Normal" agar pelaksanaan tugas dan fungsi dapat terlaksana dengan optimal dan aman dalam masa Pandemi Covid-19 bagi Pegawai Rutan Kelas I Bandung, Stakeholder, Warga Binaan Masyarakat serta masyarakat khususnya pengunjung.
- g. Pemantapan layanan kunjungan barang sesuai dengan standar operasional prosedur.
- h. Pemantapan layanan kunjungan video call melalui aplikasi google dou.

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja pada Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Bandung merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Bandung yang menerima amanah/tanggungjawab/kinerja dengan Kepala Divisi Masyarakat Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat. Dengan demikian, Perjanjian Kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya. Perjanjian Kinerja ini akan menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Bandung dalam kurun waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Berikut akan

diuraikan target kinerja tahun 2020 sesuai dengan indikator setiap sasaran serta kegiatan yang dilakukan dalam upaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS I BANDUNG
DENGAN KEPALA DIVISI PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Riko Stiven, Amd.IP., S.A.P., M.Si.
 Jabatan : Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Abdul Aris, Be.IP., S.sos., M.M.
 Jabatan : Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Jawa Barat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya, sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja disebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bandung, 24 Januari 2020

Pihak Kedua
Kepala Divisi Pemasyarakatan
Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan Ham Jawa Barat



Abdul Aris, Be.IP., S.sos., M.M.
NIP. 19630106 198503 1 002

Pihak Pertama
Kepala Rumah Tahanan Negara
Kelas I Bandung



Riko Stiven, Amd.IP., S.A.P., M.Si.
NIP. 19620116 200604 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS I BANDUNG
DENGAN KEPALA DIVISI PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pemasyarakatan	Indeksi kepuasan masyarakat terhadap layanan masyarakat	90 %
2.	Meningkatnya Pelayanan Informasi dan Kerjasama Pemasyarakatan di wilayah sesuai standar	Memoranda Residivis	1 %
		Persentase layanan informasi dan kerja sama sesuai standar	100%
3.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan di wilayah sesuai standar	Persentase data Pemasyarakatan di SDP sesuai standar	90%
		Persentase Narapidana/Tahanan yang mendapatkan pelayanan kebutuhan dasar dan Kesehatan I (Langkapan sesuai standar	90 %
4.	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	Persentase Narapidana/Tahanan yang mendapatkan pelayanan perawatan kesehatan khusus dan rehabilitasi sesuai standar	90 %
		Persentase Tahanan yang mendapatkan pelayanan administrasi tahanan, bantuan hukum dan binlogis kegiatan sesuai standar	90 %
5.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	Persentase pengaduan yang diindaklanjuti sesuai standar	90 %
		Persentase pencegahan gangguan keamanan dan pemberitaan keamanan sesuai standar	90 %
6.	Layanan Dukungan Manajemen	Persentase gangguan keamanan yang ditindak dan ditanggulangi sesuai standar	90 %
		Jumlah Layanan internal perkantoran	1 Layanan

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	Rp. 24.344.678.000,00
	Jumlah	Rp. 24.344.678.000,00

Pihak Kedua
Kepala Divisi Pemasyarakatan
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan
Ham Jawa Barat



Abdul Aris, Be.IP., S.sos., M.M.
NIP. 19630106 198503 1 002

Pihak Pertama
Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas I
Bandung



Riko Stiven, Amd.IP., S.A.P., M.Si.
NIP. 19620116 200604 1 001

Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Kinerja (*performance*) merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program/ kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi. Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu. Kinerja bisa diketahui hanya jika individu atau kelompok individu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan, kriteria keberhasilan ini berupa tujuan atau target tertentu yang hendak dicapai.

Pengukuran kinerja (*performance measurement*) adalah metode atau alat yang digunakan untuk mencatat dan menilai pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran, dan strategi sehingga dapat diketahui kemajuan organisasi serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Untuk itu diperlukan indikator kinerja yang jelas, dapat dihitung, diukur, dan dapat digunakan sebagai dasar untuk menilai tingkat kinerja yang baik.

Pengukuran capaian kinerja di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Bandung Tahun 2020 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja pada masing-masing sasaran kegiatan. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan pada aspek kinerja keuangan dan non keuangan sebagai indikator untuk mengukur keberhasilan suatu organisasi yang terintegrasi dalam sistem manajemen organisasi. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tahun 2020, maka diperoleh data capaian kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Bandung dengan perincian sebagai berikut:

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Masyarakat;	90%	96%
	Menurunnya Residivis.	1%	25%
Meningkatnya Pelayanan Informasi dan Kerjasama Masyarakat di Wilayah sesuai standar	Presentase layanan informasi dan kerjasama sesuai standar;	100%	100%
	Presentase data Masyarakat di SDP sesuai standar.	90%	90%
Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan di wilayah sesuai standar	Presentase Narapidana/Tahanan yang mendapatkan pelayanan kebutuhan dasar dan kesehatan lingkungan sesuai standar;	90%	90%
	Presentase Narapidana/Tahanan yang mendapatkan pelayanan perawatan kesehatan dasar, lanjutan, dan penyuluhan kesehatan sesuai standar;	90%	90%
	Presentase Narapidana/Tahanan yang mendapatkan pelayanan perawatan kesehatan khusus dan rehabilitasi sesuai standar.	90%	90%
Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	Presentase Tahanan yang mendapatkan pelayanan administrasi tahanan, bantuan hukum, dan bimbingan kegiatan sesuai standar.	90%	90%
Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah sesuai standar	Presentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar;	90%	90%
	Presentase pencegahan gangguan keamanan dan pemeliharaan keamanan sesuai standar;	90%	90%
	Presentase gangguan kemanan yang ditindak dan ditanggulangi sesuai standar.	90%	90%
Layanan Dukungan Manajemen	Jumlah Layanan Internal perkantoran	1 Layanan	1 Layanan

B. Realisasi Anggaran

Alokasi Anggaran ini diisi dengan pagu alokasi Unit Pelaksana Teknis yang terdapat dalam RKA-KL pada tahun anggaran. Menjelaskan anggaran pada tiap akun yaitu belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA TINGKAT SATUAN KERJA PERIODE YANG BERAKHIR 30 DESEMBER 2020

Kementerian Negara/Lembaga	: 013	Kementerian Hukum dan HAM RI
Eselon I	: 05	Ditjen Pemasyarakatan
Wilayah/Provinsi	: 0200	BA(013) ES1(05) Jawa Barat
Satuan Kerja	: 526801	Rumah Tahanan Negara Bandung
Jenis Satuan Kerja	: KD	

**LAPORAN REALISASI
RUMAH TAHANAN NEGARA BANDUNG**

Bulan : **Desember**

Kode	Uraian [register - Beban - jnsban- Cr Tarik - KPPN - Lokasi - Kabkota]	Pagu	Realisasi	Sisa Dana
08	Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasarakatan	21.668.349.000	21.646.677.598	21.671.402
5252	Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	21.668.349.000	21.646.677.598	21.671.402
5252.001	Layanan Tahanan	50.135.000	48.342.384	1.792.616
5252.001.001	Tanpa Sub Output	50.135.000	48.342.384	1.792.616
051	Administral Tahanan	18.448.000	17.636.469	811.531
A	<u>Sidang Tim Pengamat Pemasarakatan</u>	7.790.000	7.568.400	221.600
521211	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Bahan	6.290.000	6.288.400	1.600
524113	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	1.500.000	1.280.000	220.000
B	<u>Pemberian remisi, PB, CB, CMB, CMK</u>	6.158.000	5.871.069	286.931
521211	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Bahan	4.958.000	4.957.319	681
524113	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	1.200.000	913.750	286.250
C	<u>Penyuluhan Hukum</u>	2.250.000	2.100.000	150.000
521211	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Bahan	2.100.000	2.100.000	0
524113	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	150.000	0	150.000
D	<u>Rapat Koordinasi</u>	2.250.000	2.097.000	153.000
521211	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Bahan	2.100.000	2.097.000	3.000
524113	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	150.000	0	150.000
052	Pembimbingan kegiatan Tahanan	31.687.000	30.705.915	981.085
A	<u>Kegiatan Keagamaan</u>	20.262.000	19.629.724	632.276
521211	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Bahan	14.900.000	14.672.680	227.320
521219	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Barang Non Operasional Lainnya	4.962.000	4.957.044	4.956
522151	[00000000-A-0-0-022-02-51] Beban Jasa Profesi	250.000	0	250.000
524113	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	150.000	0	150.000
B	<u>Kegiatan Pramuka, Kesadaran Berbangsa dan Bernegara</u>	8.775.000	8.582.209	192.791
521211	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Bahan	4.375.000	4.372.254	2.746
521219	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Barang Non Operasional Lainnya	3.500.000	3.470.455	29.545
524113	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	900.000	739.500	160.500
C	<u>Kegiatan Kesenian dan Olahraga</u>	2.650.000	2.493.982	156.018
521219	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Barang Non Operasional Lainnya	2.500.000	2.493.982	6.018
524113	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	150.000	0	150.000
5252.005	Layanan Perawatan Narapidana/tahanan	7.863.037.000	7.860.685.214	2.351.786
5252.005.001	Kebutuhan Dasar, Kesehatan Lingkungan, dan Layanan Rehabilitasi	7.863.037.000	7.860.685.214	2.351.786
005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	7.227.334.000	7.227.326.072	7.928
A	<u>Bahan Makanan Napl/Tahanan</u>	7.227.334.000	7.227.326.072	7.928
521112	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Pengadaan Bahan Makanan	7.227.334.000	7.227.326.072	7.928
051	Kebutuhan Dasar	340.923.000	340.702.837	220.163
A	<u>Kebutuhan Sandang</u>	160.000.000	159.994.655	5.345
521811	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	160.000.000	159.994.655	5.345
B	<u>Pemenuhan Sarana Makan Minum</u>	42.250.000	42.250.000	0
521811	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	42.250.000	42.250.000	0
C	<u>Pemenuhan Perlengkapan mandi</u>	50.000.000	50.000.000	0
521811	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	50.000.000	50.000.000	0
D	<u>Perlengkapan Khusus Kelompok Rentan</u>	5.300.000	5.298.182	1.818
521811	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	5.300.000	5.298.182	1.818
F	<u>Ekstra Voeding</u>	83.200.000	83.160.000	40.000
521211	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Bahan	83.200.000	83.160.000	40.000
H	<u>Pemulasaran</u>	173.000	0	173.000
521219	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Barang Non Operasional Lainnya	173.000	0	173.000
052	Layanan Kesehatan	294.780.000	292.656.305	2.123.695
A	<u>Perawatan Kesehatan Tahanan/Narapidana</u>	14.020.000	11.917.190	2.102.810
521219	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Barang Non Operasional Lainnya	12.000.000	11.917.190	82.810
522151	[00000000-A-0-0-022-02-51] Beban Jasa Profesi	2.020.000	0	2.020.000
B	<u>Perlengkapan Medis Poliklinik</u>	183.060.000	183.052.000	8.000
521131	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Barang Operasional - Penanganan	3.790.000	3.789.500	500
521811	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	179.270.000	179.262.500	7.500
C	<u>Penanganan dan Pencegahan COVID-19</u>	97.700.000	97.687.115	12.885
521131	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Barang Operasional - Penanganan	25.000.000	25.000.000	0
521241	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Barang Non Operasional - Penanganan	52.700.000	52.693.954	6.046
521841	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi	20.000.000	19.993.161	6.839
5252.012	Layanan Keamanan dan Ketertiban	27.725.000	27.412.931	312.069
5252.012.001	Tanpa Sub Output	27.725.000	27.412.931	312.069
051	Penegakan Keamanan dan Ketertiban	6.300.000	6.287.946	12.054
A	<u>Penegakan Kamtib</u>	6.300.000	6.287.946	12.054
521211	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Bahan	2.100.000	2.097.491	2.509
521219	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Barang Non Operasional Lainnya	4.200.000	4.190.455	9.545
052	Pengawasan	21.425.000	21.124.985	300.015

= Terdapat Pengembalian Belanja [Sisa Dana = Pagu-(Blokir+SKPA Keluar+realisasi)+Pengembalian Belanja]

Kode	Uraian [register - Beban -jnsban- Cr Tarik - KPPN - Lokasi - Kabkota]	Pagu	Realisasi	Sisa Dana
A	<u>Pengawalan</u>	1.950.000	1.800.000	150.000
524111	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Perjalanan Biasa	1.800.000	1.800.000	0
524113	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	150.000	0	150.000
B	<u>Perpindahan</u>	19.475.000	19.324.985	150.015
521211	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Bahan	15.725.000	15.724.985	15
524111	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Perjalanan Biasa	3.600.000	3.600.000	0
524113	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	150.000	0	150.000
5252.970	Layanan Dukungan Manajemen Satker	89.080.000	85.596.842	3.483.158
5252.970.001	Tanpa Sub Output	89.080.000	85.596.842	3.483.158
051	<u>Penyusunan rencana program dan Penyusunan rencana anggaran</u>			
A	<u>Penyusunan RKAKL</u>			
521211	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Bahan	3.500.000	3.131.250	368.750
524111	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Perjalanan Biasa	3.500.000	3.131.250	368.750
524113	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	2.150.000	2.150.000	0
052	<u>Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi</u>			
A	<u>PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA</u>			
521211	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Bahan	11.700.000	10.794.673	905.327
524111	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Perjalanan Biasa	3.300.000	2.906.064	393.936
524113	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	2.250.000	2.231.064	18.936
B	<u>Reformasi Birokrasi</u>			
521211	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Bahan	8.400.000	7.888.609	511.391
524111	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Perjalanan Biasa	5.400.000	5.388.609	11.391
524113	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	1.500.000	1.250.000	250.000
053	<u>Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan</u>			
A	<u>Pengelola Sistem Akuntansi</u>			
521211	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Bahan	5.775.000	5.388.985	386.015
524111	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Perjalanan Biasa	5.775.000	5.388.985	386.015
524113	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	4.875.000	4.841.385	33.615
054	<u>Pengelolaan kepegawaian</u>			
A	<u>Pembinaan Fisik Mental dan Disiplin (FMD)</u>			
521211	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Bahan	41.175.000	41.175.000	0
521219	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Barang Non Operasional Lainnya	41.175.000	41.175.000	0
522151	[00000000-A-0-0-022-02-51] Beban Jasa Profesi	6.825.000	6.825.000	0
055	<u>Pelayanan umum, Pelayanan rumah tangga dan perlengkapan</u>			
A	<u>URUSAN UMUM</u>			
521211	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Bahan	29.250.000	29.250.000	0
524111	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Perjalanan Biasa	5.100.000	5.100.000	0
524113	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	26.930.000	25.106.934	1.823.066
B	<u>PENGLOLA SARAN TINGKAT UAKPA</u>			
521211	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Bahan	6.600.000	6.286.934	313.066
524111	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Perjalanan Biasa	6.300.000	6.286.934	13.066
524113	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	150.000	0	150.000
C	<u>Administrasi Pengadaan Baras</u>			
521213	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Honor Output Kegiatan	7.370.000	6.920.000	450.000
521211	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Bahan	6.470.000	6.450.000	20.000
524111	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Perjalanan Biasa	750.000	470.000	280.000
524113	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	150.000	0	150.000
001	<u>Operasional dan Pemeliharaan Kantor</u>			
A	<u>KESEHATAN PEGAWAI</u>			
521811	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	12.960.000	11.900.000	1.060.000
B	<u>Pakaian Dinas</u>			
521119	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Barang Operasional Lainnya	12.960.000	11.900.000	1.060.000
C	<u>PEMELIHARAAN GEDUNG BANGUNAN DAN HALAMAN</u>			
523111	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan	13.638.372.000	13.624.640.227	13.731.773
D	<u>Pemeliharaan Peralatan Perkantoran</u>			
523121	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	13.638.372.000	13.624.640.227	13.731.773
E	<u>Pemeliharaan Kendaraan</u>			
523121	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	48.306.000	48.204.000	102.000
F	<u>Langganan Daya dan Jasa</u>	2.056.819.000	2.048.577.419	8.241.581
521811	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	4.100.000	4.097.864	2.136
521119	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Barang Operasional Lainnya	4.100.000	4.097.864	2.136
523111	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan	155.200.000	155.090.945	109.055
523121	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	155.200.000	155.090.945	109.055
523121	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	458.950.000	458.945.236	4.764
523121	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	458.950.000	458.945.236	4.764
523121	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	51.319.000	51.310.725	8.275
523121	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	51.319.000	51.310.725	8.275
523121	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	53.000.000	52.998.152	1.848
523121	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	53.000.000	52.998.152	1.848
523121	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	861.780.000	853.891.948	7.888.052

= Terdapat Pengembalian Belanja [Sisa Dana = Pagu-(Blokir+SKPA Keluar+realisasi)+Pengembalian Belanja]

Kode	Uraian [register - Beban - jnsban- Cr Tarik - KPPN - Lokasi - Kabkota]	Pagu	Realisasi	Sisa Dana
521111	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Keperluan Perkantoran	26.400.000	26.396.836	3.164
522111	[00000000-A-0-0-022-02-51] Beban Langganan Listrik	801.900.000	795.216.102	6.683.898
522112	[00000000-A-0-0-022-02-51] Beban Langganan Telepon	1.200.000	780.010	419.990
522113	[00000000-A-0-0-022-02-51] Beban Langganan Air	32.280.000	31.499.000	781.000
G	<u>Jasa Pos</u>	4.500.000	4.495.227	4.773
521114	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	4.500.000	4.495.227	4.773
H	<u>KEPERLUAN PERKANTORAN</u>	214.205.000	214.151.245	53.755
521111	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Keperluan Perkantoran	184.805.000	184.804.625	375
521811	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	29.400.000	29.346.620	53.380
I	<u>Konsultasi dan Koordinasi</u>	1.800.000	1.772.691	27.309
524111	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Perjalanan Biasa	1.800.000	1.772.691	27.309
J	<u>Jamuan Tamu</u>	1.200.000	1.171.500	28.500
521211	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Bahan	1.200.000	1.171.500	28.500
K	<u>Honor Operasional Satuan Kerja</u>	113.890.000	113.800.000	90.000
521115	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	113.890.000	113.800.000	90.000
L	<u>Penambah Daya Tahan Tubuh</u>	136.875.000	136.851.886	23.114
521113	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	136.875.000	136.851.886	23.114

C. Evaluasi dan Analisis Realisasi Kinerja

Pengukuran kinerja di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Bandung menggunakan metode yang diatur dalam peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Adapun hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap tujuan dan sasaran kami sampaikan sebagai berikut:

Indikator 1

Presentase Pelayanan Pemasarakatan

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pemasarakatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Masyarakat;	90%	90%
	Menurunnya Residivis.	1%	25%

Tabel 6. Indikator 1 Realisasi Kinerja Tahun 2020

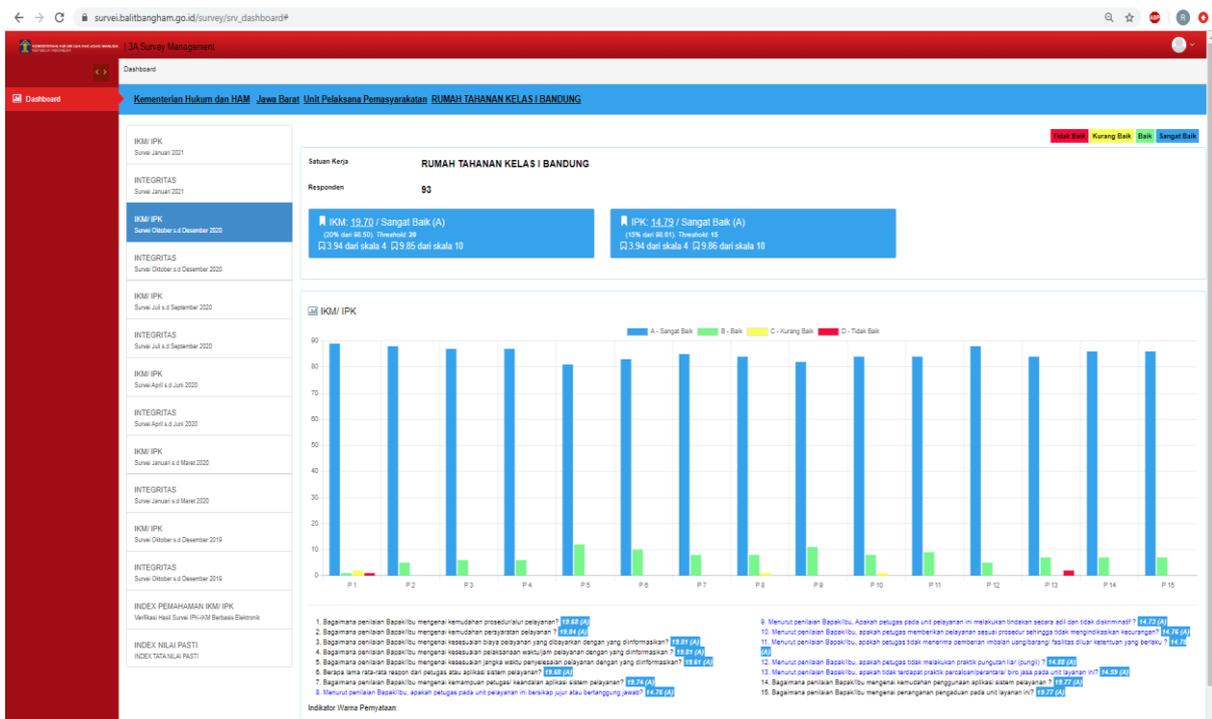
Indikator ini memiliki target sebesar 90%, untuk mengetahui capaian hasil realisasi dari indikator tersebut kita harus menghitung presentase Kuliatas Pelayanan Pemasarakatan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pemasarakatan. Namun mengingat instrument untuk mengukur persentase pelayanan pembinaan sesuai standar belum ditetapkan, maka pengukuran indikator ini akan dinilai dari capaian sub indikator sebagai berikut:

1. Indeks Kepuasan Masyakat terhadap Layanan Pemasarakatan; dan
2. Menurunnya Residivis.

Berdasarkan data yang ada di Sistem database pemasyarakatan (SDP) jumlah residivis pada Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Bandung yaitu 235 orang dari total Napi 1112 orang dalam hal ini masih terdapat WBP yang belum mampu mengerti dan mempergunakan keterampilan dari pembinaan. Maka dari itu bentuk keberhasilan dan kekurangan pada Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Bandung yaitu:

1. Masa pandemi menyebabkan keterbatasan lapangan pekerjaan yang tersedia setelah bebas;
2. Terbatasnya pegawai dibidang pembinaan;
3. Rendahnya pemantauan Narapidana setelah bebas dari Rutan;
4. Belum adanya program pembinaan kelanjutan bagi narapidana yang telah bebas dari Rutan.

Berdasarkan data yang ada, kondisi tahanan dan narapidana selama Tahun 2020 di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Bandung dapat digambarkan sebagai berikut. Grafik survey layanan kunjungan Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Bandung Tahun 2020 dapat dilihat pada gambar.



Survey Layanan Kunjungan Rumah Tahanan Kelas 1 Bandung

Indikator 2

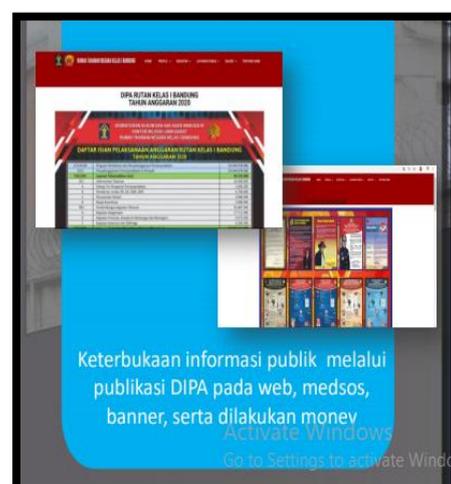
Meningkatnya Pelayanan Informasi dan Kerjasama Pemasyarakatan

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
Meningkatnya Pelayanan Informasi dan Kerjasama Pemasyarakatan di Wilayah sesuai standar	Presentase layanan informasi dan kerjasama sesuai standar;	100%	100%
	Presentase data Pemasyarakatan di SDP sesuai standar.	90%	90%

1. Presentase media layanan informasi yang telah digunakan Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Bandung dalam melaksanakan layanan informasi, telah memanfaatkan beberapa media layanan informasi, yaitu:

Media Informasi	Sudah Digunakan	Belum Digunakan	Capaian
Website	√		100%
Self Service	√		100%
Banner/Leflet	√		100%
Papan Informasi	√		100%
Ruang Layanan Informasi	√		100%
Media Sosial (Twitter, Facebook, dll)	√		100%

Berdasarkan data tersebut diatas maka capaian sub indikator ini adalah **100 %** atau 6 media informasi dari 6 media informasi yang wajib digunakan sesuai standar. Target dari indikator ini pada Tahun 2020 adalah sebesar 90%. Sehingga capaian dari indikator ini telah mencapai target yang telah ditetapkan.



Namun demikian terdapat beberapa catatan dalam pencapaian indikator ini, yaitu:

1. Rendahnya minat masyarakat untuk mengakses informasi cetak dan digital;
 2. Minimnya anggaran yang ada yang mendukung pelaksanaan layanan informasi; dan
 3. Minimnya petugas yang memiliki kapasitas dalam memberikan layanan informasi.
2. Kegiatan pembinaan di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Bandung bukan hanya kegiatan kerja dan pelatihan kerja, namun kegiatan setiap hari yang dilakukan dan tersebar menyeluruh pembinaannya yaitu pembinaan kerohanian yang bertujuan untuk perkembangan diri secara rohani, mental dan perilaku yang dimaksudkan agar setelah kembali kemasyarakat dapat kembali lebih produktif lagi dalam bersosialisasi dan menjadi manusia yang utuh tanpa mengulangi kesalahan yang sama. Untuk pembinaan kemandirian dan kerohanian di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Bandung yaitu baca tulis Qur'an, kajian pendalaman islam, kajian fiqh dan muamalah, serta kegiatan kebaktian rutin setiap hari kecuali hari jum'at. Berikut data Narapidana sesuai keyakinannya adalah sebagai berikut:

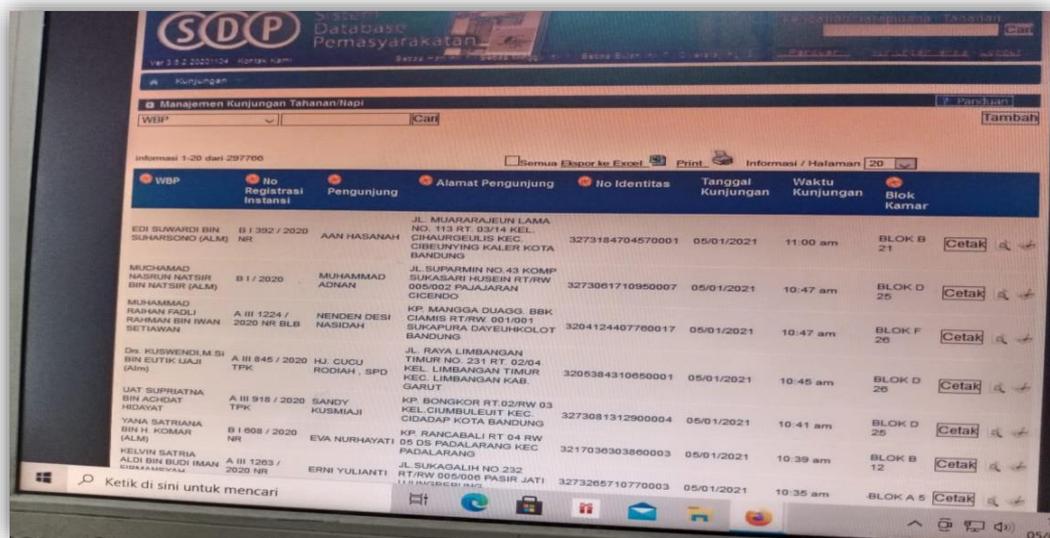
Agama	Jumlah Narapidana dan tahanan yang mendapatkan Pembinaan Keagamaan
Islam	1066
Katolik	6
Kristen Protestan	24
Budha	-
Hindu	-
Konghucu	-
Jumlah	1096

Uraian	Tahun 2020
Penghuni:	1096
Tahanan Dewasa	396
Tahanan Anak	-
Narapidana Dewasa	700
Narapidana anak	-
Jumlah	1096

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa tingkat hunian di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Bandung masih setengah dari kapasitas. Kapasitas Rutan saat ini adalah 2160 orang atau jika dipresentasikan yaitu 50,7%.

3. Narapidana yang mendapatkan pelayanan administrasi

Untuk pelayanan narapidana dalam pengadministrasian di Rutan Kelas 1 Bandung sudah menggunakan aplikasi SDP jadi untuk pengurusan hak integritasnya sudah sepenuhnya dilakukan, maka dari itu berdasarkan tabel diatas dari target 90% sedangkan realisasi 90% menandakan bahwa Rutan Bandung dalam hal pelayanan administrasi sudah sangat maksimal. Berikut contoh aplikasi SDP.



4. Narapidana yang mnedapatkan pelayanan integrasi

Berikut data program pembinaan integrasi tahun 2020:

Bulan	CB	PB	CMB	Asimilasi
Januari	30	30	-	-
Februari	54	25	-	-
Maret	58	11	-	-
April	3	4	-	433
Mei	-	2	-	128
Juni	3	-	-	76
Juli	3	-	-	71
Agustus	-	-	-	150
September	1	1	-	62
Oktober	-	1	-	21
November	2	1	-	21

Desember	-	1	-	14
Jumlah	154	76	0	976
Total	1206			

Berdasarkan dari tabel diatas Warga Binaan Pemasyarakatan di Rutan Kelas I Bandung yang mengikuti program usulan pembinaan integrasi dan asimilasi pada tahun 2020 mencapai 1206 warga binaan pemasyarakatan:

1. Adanya ketentuan terkait asimilasi pandemic yaitu Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

Indikator 3

Peningkatan Pelayanan Perawatan Narapidana dan Tahanan

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN
Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan di wilayah sesuai standar	Presentase Narapidana/Tahanan yang mendapatkan pelayanan kebutuhan dasar dan kesehatan lingkungan sesuai standar;	90%	100%
	Presentase Narapidana/Tahanan yang mendapatkan pelayanan perawatan kesehatan dasar, lanjutan, dan penyuluhan kesehatan sesuai standar;	90%	100%
	Presentase Narapidana/Tahanan yang mendapatkan pelayanan perawatan kesehatan khusus dan rehabilitasi sesuai standar.	90%	100%

1. Presentase narapidana/tahanan yang mendapat pelayanan kebutuhan dasar dan kesehatan lingkungan, memiliki capaian 100% hal ini didapatkan dari setiap WBP mendapatkan pelayanan perawatan sesuai dengan standar yakni

kebutuhan makanan yang layak, higienis yang memenuhi kesehatan makanan sesuai standar. Untuk kesehatan lingkungan di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Bandung menurut survey BPS kesehatan di lingkungan Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Bandung ternilai baik karena sudah memenuhi kesehatan lingkungan, terlihat sarana dan prasarana untuk kegiatan berolahraga, saluran air yang bersih dan ruang halaman yang tertata rapi disertakan taman untuk kesejukan di blok hunian.

2. Presentase narapidana/tahanan yang mendapatkan pelayanan perawatan kesehatan dasar, lanjutan dan penyuluhan kesehatan di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Bandung mencapai target 100% meskipun dalam pelaksanaannya masih ada kekurangan dalam hal penanganan karena SDM yang mampu masih belum memadai, akan tetapi semua layanan kesehatan untuk WBP berjalan selama 24 jam dengan petugas yang mampu dan siap menerima pasien kapanpun dengan sigap, bukan hanya menerima pasien yang datang ke poliklinik, program Rutan juga menyambangi setiap kamar blok hunian untuk kontrol kesehatan WBP dan lingkungan yang ada di kamar hunian.
3. Presentase narapidana/tahanan yang mendapatkan pelayanan perawatan kesehatan khusus dan rehabilitasi di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Bandung mencapai target. Untuk penanganan perawatan khusus Rutan berupaya kerjasama dengan pihak Rumah Sakit Daerah untuk melakukan perawatan kesehatan khusus dalam hal jenis penyakit tertentu dan tidak tertentu. Dalam mengukur persentase pelayanan perawatan kesehatan sesuai standar, maka pengukuran indikator ini akan dinilai dari capaian sub indikator sebagai berikut:
 1. Persentase tahanan dan narapidana yang sakit dan mendapatkan penanganan medis;
 2. Persentase tahanan dan narapidana yang mendapatkan perawatan makanan sesuai standar; dan
 3. Persentase tahanan/narapidana yang mendapatkan perlengkapan tidur, makan, dan perlengkapan alat mandi.
 4. Adapun capaian dari masing-masing sub indikator tersebut adalah:
 - Capaian Sub Indikator: Persentase tahanan dan narapidana yang sakit dan mendapatkan penanganan medis.

Tabel 3.8 Jumlah Tahanan dan Narapidana yang Mendapatkan Penanganan Medis

Bulan	Jumlah Yang Ditangani
Januari	263
Februari	403
Maret	404
April	219
Mei	122
Juni	106
Juli	210
Agustus	128
September	126
Oktober	112
November	173
Desember	263

Berdasarkan data tersebut diatas maka capaian sub indikator ini adalah **2.289** tahanan dan narapidana yang sakit tahun 2020:

- Capaian Sub Indikator: Persentase tahanan dan narapidana yang mendapatkan perawatan sesuai standar. Jumlah narapidana dan tahanan pada tahun 2020 berdasarkan data diatas adalah 2.289 orang.
- Capaian Sub Indikator: Persentase tahanan/narapidana yang mendapatkan pelayanan perawatan.



Tabel 3.9 Jenis Perawatan yang diberikan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan

No.	Jenis Perawatan
1	Perawatan Kesehatan
2	Perawatan Makan

3	Pemberian alat mandi, alat makan tempat tidur, dan pakaian
----------	------------------------------------------------------------

Berdasarkan data tersebut diatas maka capaian sub indikator ini adalah 100% pada tahun 2020. Target dari indikator ini pada tahun 2020 adalah sebesar 100%. Sehingga capaian dari indikator ini memenuhi dari target yang telah ditetapkan. Namun demikian secara kualitas pencapaian indikator ini terdapat beberapa catatan, yaitu:

1. Tidak adanya anggaran pengadaan matras, sehingga pemenuhan kebutuhan matras menggunakan matras tranfer dari Direktorat Jenderal Pemasayaran pengadaan tahun sebelumnya.
2. Pengadaan perlengkapan mandi volumenya terbatas.

Indikator 4

Meningkatnya pelayanan Tahanan di dalam Rutan

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN
Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	Presentase Tahanan yang mendapatkan pelayanan administrasi tahanan, bantuan hukum, dan bimbingan kegiatan sesuai standar.	90%	100%

1. persentase tahanan yang mendapatkan pelayanan administrasi bantuan hukum sudah maksimal, sehingga capaian kinerja pada indicator ini sudah memenuhi ambang batas capaian yaitu 90%. Berdasarkan hal tersebut, maka seluruh Tahanan yang ada di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Bandung menerima advokasi pelayanan Tahanan.

Indikator 5

Meningkatnya pelayanan keamanan dan ketertiban di dalam Rutan

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN
Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan	Presentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar;	90%	100%

Ketertiban di Wilayah sesuai standar	Presentase pencegahan gangguan keamanan dan pemeliharaan keamanan sesuai standar;	90%	100%
	Presentase gangguan keamanan yang ditindak dan ditanggulangi sesuai standar.	90%	100%
Layanan Dukungan Manajemen	Jumlah Layanan Internal perkantoran	1 Layanan	100%

1. persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar untuk pengaduan di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Bandung menggunakan sarana kotak saran, Kontak pengaduan dan sosial media. Sedangkan untuk pengaduan secara langsung sudah tersedia layanan informasi dan pengaduan di ruang kunjungan. Untuk rekap pengaduan dari bulan Januari sampai dengan Desember hanya mendapatkan 1% itupun bukan murni pengaduan akan tetapi lebih bersifat permintaan informasi, dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa selama ini penerimaan pengaduan sangatlah minim hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa pelayanan dan pembinaan di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Bandung sudah sangat baik, akan tetapi masih ada beberapa kekeliruan dalam pengaduan yang diterima, bukan hanya melakukan pengaduan dalam menindaklanjutinya Rutan Bandung sangatlah cepat tujuannya supaya masalah yang dihadapi agar cepat terselesaikan dan mampu memberikan pelayanan yang lebih baik lagi;
2. Presentase pencegahan gangguan keamanan dan pemeliharaan keamanan di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Bandung salah satu kegiatannya yaitu Sidak, kegiatan sidak di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Bandung terjadwal dalam 1 bulan yaitu 4 kali kegiatan, tujuannya yaitu untuk memberantas HALINAR yaitu hp, pungli dan narkoba. Akan tetapi pada pelaksanaannya sidak yang dilakukan haruslah terorganisir dan tidak boleh terlalu sering hal ini untuk mencegah terjadinya provokasi dan ketidaknyamanan peri kehidupan di dalam Rutan.
3. Presentase gangguan keamanan yang ditindak dan di tanggulangi di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Bandung yaitu bentuk kegiatannya adalah Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap WBP ataupun masyarakat pengunjung yang melakukan pelanggaran di dalam Rutan. Untuk pengambilan datanya dapat mengambil dari pengaduan yang masuk ke bagian administrasi Kamtib yang sudah

diproses. Per Desember Tahun 2020 didapatkan realisasi 100% dari total pengaduan yang masuk 1% hal ini dikarenakan tidak semua pengaduan dan gangguan keamanan harus di BAP karena melihat permasalahan yang ada.

4. Penguatan dan pengembangan kapasitas Petugas Jaga Rutan Kelas 1 Bandung terus ditingkatkan dengan dibekali kegiatan pelatihan dan pembekalan diri dalam pencegahan gangguan keamanan dan mengaja kondusifitas Rutan Kelas 1 Bandung melalui pelatihan petugas juara siaga bencana dan Latihan menembak dalam rangka pembinaan fisik dan mental pegawai.



Indikator 6

Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN
Layanan Dukungan Manajemen	Jumlah Layanan Internal perkantoran	1 Layanan	100%

Pelayanan Internal Perkantoran adalah Pelayanan yang di berikan oleh sebuah unit organisasi/orang yang bekerja pada unit organisasi tersebut ke unit lain atau kepada pegawai lain dalam sebuah organisasi. Berdasarkan pengertian tersebut jumlah layanan internal perkantoran Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Bandung sampai dengan bulan Desember 2020 adalah sebagai berikut:

1. Layanan administrasi kepegawaian yaitu layanan usul Kenaikan Pangkat, Usul Cuti, usul diklat/latsar. Untuk periode kenaikan pangkat April dan Oktober 2020 telah terealisasi kenaikan pangkatnya;
2. layanan kesejahteraan pegawai telah dilaksanakan dengan baik terhadap pemberian hak pegawai berupa gaji, tunjangan dan uang makan;

3. Layanan ketersediaan kebutuhan ATK perkantoran untuk pelaksanaan Tusi telah dilaksanakan dengan baik setiap bulan;
4. Layanan pemberian fasilitas mobilitas telah diberikan melalui penyediaan kendaraan baik roda 4 maupun roda 2; dan
5. Layanan ketersediaan tenaga listrik dan gedung yang layak telah dapat dipenuhi dengan baik dalam hal terjadi pemadaman listrik menggunakan genset.

Adapun Pagu Anggaran keseluruhan Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Bandung Adalah sebesar Rp. 21.668.349.000,- Nilai realisasi nya sebesar Rp.21.646.677.598 Nilai Realisasi dalam % adalah 99.90%.

A. AKUNTABILITAS KEUANGAN

1. Analisis Penggunaan Sumber Daya Anggaran

Pada dasarnya pembagian alokasi anggaran pada satuan kerja disesuaikan dengan prioritas pembangunan. Pada tabel dibawah ini disajikan alokasi anggaran untuk masing-masing sasaran ataupun urusan:

Nama Kegiatan	Nama Output	Anggaran	
		Pagu (Rp)	Total realisasi (Rp)
Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Masyarakat	Layanan Tahanan	50.135.000	48.342.384
Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Masyarakat	Layanan Perawatan Narapidana/Tahanan	7.863.037.000	7.860.685.214
Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Masyarakat	Layanan keamanan dan ketertiban	27.725.000	27.412.931
Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Masyarakat	Layanan Dukungan Manajemen Satker	89.080.000	85.596.842
Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Masyarakat	Layanan Perkantoran	13.638.372.000	13.642.640.277
Total		21.668.349.000	21.646.677.598

2. Analisis Rasio Keuangan Kaitannya dengan Pencapaian Kinerja

Dalam suatu sistem pengelolaan keuangan disatuan kerja di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Bandung terkait dengan kegiatan realisasi program perlu ditetapkan standar atau acuan supaya dalam pelaksanaannya efektif dan efisien serta akuntabel. Untuk itu diperlukan suatu pengukuran kinerja keuangan sebagai tolak ukur dalam penetapan kebijakan keuangan pada tahun anggaran selanjutnya. Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas pemerintah dalam melakukan pengelolaan keuangan. Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan yang menunjukkan bahwa uang public tersebut telah dibelanjakan secara ekonomis, efektif dan efisien.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Bandung Pengukuran kinerja keuangan secara umum mencakup 2 (tiga) bidang yang saling terkait antara satu dengan yang lainnya, meliputi:

- 1) Analisis pengeluaran, yaitu analisis mengenai seberapa besar biaya-biaya dari suatu kegiatan;
- 2) Analisis anggaran, yaitu analisis mengenai hubungan antara pendapatan, belanja dan proyeksi tahun mendatang.

Salah satu alat untuk menganalisis kinerja Rutan Kelas 1 Bandung dalam mengelola keuangan adalah dengan melakukan analisis rasio terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan

A. KETERLIBATAN PIMPINAN

Penyusunan rencana kinerja & RKA K/L disusun berdasarkan rapat yang melibatkan pimpinan untuk mencapai visi dan misi organisasi.

B. PENGELOLAAN AKUNTABILITAS KINERJA

Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Tahunan dan LAKIP serta kegiatan sosialisasinya.

Activate
Go to Setti

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan kegiatan dan anggarannya, Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Bandung telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2020. LAKIP ini menyajikan informasi mengenai capaian kinerja seluruh rangkaian program dan kegiatan Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Bandung, baik dari aspek finansial maupun non-finansial, selama tahun 2020 secara komprehensif sebagai wujud pertanggung jawaban publik (*public accountability*).

LAKIP disusun berdasarkan dokumen Perencanaan Kinerja dan dokumen Perjanjian Kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Bandung pada tahun 2020 yang mengacu sepenuhnya pada Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2020-2024 dan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tahun 2020-2024. Secara garis besar capaian kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Bandung pada Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pemasyarakatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Masyarakat;	90%	90%	100%
	Menurunnya Residivis.	1%	1%	100%
Meningkatnya Pelayanan Informasi dan Kerjasama Pemasyarakatan di Wilayah sesuai standar	Presentase layanan informasi dan kerjasama sesuai standar;	100%	100%	100%
	Presentase data Pemasyarakatan di SDP sesuai standar.	90%	90%	100%
Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan di wilayah sesuai standar	Presentase Narapidana/Tahanan yang mendapatkan pelayanan kebutuhan dasar dan kesehatan lingkungan sesuai standar;	90%	90%	100%
	Presentase Narapidana/Tahanan yang mendapatkan pelayanan perawatan kesehatan dasar, lanjutan, dan penyuluhan kesehatan sesuai standar;	90%	90%	100%

	Presentase Narapidana/Tahanan yang mendapatkan pelayanan perawatan kesehatan khusus dan rehabilitasi sesuai standar.	90%	90%	100%
Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	Presentase Tahanan yang mendapatkan pelayanan administrasi tahanan, bantuan hukum, dan bimbingan kegiatan sesuai standar.	90%	90%	100%
Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah sesuai standar	Presentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar;	90%	90%	100%
	Presentase pencegahan gangguan keamanan dan pemeliharaan keamanan sesuai standar;	90%	90%	100%
	Presentase gangguan keamanan yang ditindak dan ditanggulangi sesuai standar.	90%	90%	100%
Layanan Dukungan Manajemen	Jumlah Layanan Internal perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	100%

Dari hasil capaian tersebut, maka Target kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Bandung adalah sebesar 100 % dengan realisasi sebesar 99,90 %. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Bandung tahun 2020 telah memenuhi target. Capaian kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Bandung berdasarkan hasil penghitungan di atas sudah termasuk kategori Baik

Pencapaian kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Bandung Tahun 2020 maksimal. Hal ini tidak lepas dari peran serta seluruh elemen organisasi Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Bandung yang terlibat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, program strategis serta partisipasi publik melalui berbagai kemitraan dengan stakeholder.

B. Saran

Dalam meningkatkan kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Bandung khususnya dalam pencapaian sasaran perlu dilakukan langkah sebagai berikut:

1. Memperkuat koordinasi antara Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Bandung dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat, Ditjen Pemasyarakatan dan Sekretariat Jenderal serta pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas pemasyarakatan;
2. Meningkatkan kapasitas SDM Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Bandung melalui kegiatan bimbingan teknis, pelatihan, diklat teknis pemasyarakatan dan kegiatan coaching serta mentoring dari pimpinan;
3. Meningkatkan alokasi anggaran Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Bandung dalam rangka memenuhi kebutuhan standar kegiatan teknis pemasyarakatan;
4. Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan;
5. Meningkatkan dan memperkuat sistem pengawasan baik terhadap warga binaan pemasyarakatan maupun terhadap petugas pemasyarakatan.